

BAB 4

Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, kesetaraan jender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi Nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Tabel 3.1
JUMLAH DESA MISKIN , JUMLAH PENDUDUK MISKIN DIRINCI PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN AN	Jumlah Desa / Kelurahan Miskin	Jumlah Penduduk (Jiwa)	% Desa / Kelurahan Miskin	Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bki Ulu Terawas	21	8	41388	38,10	17.471	42,21
2	Selangit	11	6	15995	54,55	6.726	42,05
3	Rupit	13	5	26248	38,46	5.186	19,76
4	Rawas Ilir	11	7	21057	63,64	5.997	28,48
5	Ulu Rawas	7	6	9802	85,71	3.120	31,83
6	Nibung	10	5	17593	50,00	5.066	28,80
7	Rawas Ulu	13	6	28182	46,15	6.597	23,41
8	Tugu Mulyo	17	3	38035	17,65	9.681	25,45
9	Jayaloka	19	6	22849	31,58	8.859	38,77
10	Muaralaktan	20	7	31692	35,00	8.255	26,05
11	Muara Beliti	18	8	30613	44,44	20.193	65,96
12	Muara Kelingi	30	11	51849	36,67	25.553	49,28
13	Bts Ulu	19	9	21968	47,37	15.078	68,64
14	Megang Sakti	18	7	44060	38,89	21.473	48,74
15	Karang Jaya	14	6	25196	42,86	12.560	49,85
16	Karang Dapo	9	5	16078	55,56	4.444	27,64
17	Purwodadi	11	3	13623	27,27	3.529	25,90
	JUMLAH (KAB)	261	108	465.682	42,42	179.788	39,41

A. PERMASALAHAN

Secara garis besar, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas meliputi :

1. Tingginya jumlah penduduk miskin yang tersebar di seluruh wilayah
2. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
3. Terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;

4. Terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
5. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin;
6. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
7. Terbatasnya akses terhadap air bersih;
8. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
9. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam;
10. Banyaknya desa yang terisolir dan tertinggal yaitu sebanyak 108;

B. SASARAN

1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ;
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu;
3. Terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang lebih baik;
4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan merata;
5. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;

C. ARAH KEBIJAKAN

1. Pemenuhan Hak atas Pangan

Pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin dilakukan dengan:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat miskin dalam mendukung ketahanan pangan lokal;
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang diversifikasi pangan yang tidak diskriminatif jender dalam keluarga;
3. Menyempurnakan sistem penyediaan dan distribusi dengan harga yang terjangkau;
4. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan; dan
5. Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial.

2. Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan

Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan dengan:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengembangan pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat;
3. Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan;
4. Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
5. Meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk membiayai pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
7. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi

3. Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan

Pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu dilakukan dengan:

1. Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang wajib belajar Sembilan Tahun melalui jalur formal atau non formal bagi masyarakat miskin;
2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara;
3. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu;
4. Meningkatkan tenaga pendidik dalam jumlah dan kualitas, khusus di desa-desa tertinggal;
5. Memberikan kesempatan kepada anak yang berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

D. PROGRAM

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan

stakeholder terkait untuk meningkatkan efektifitas pencapaian program yang dijalankan.

1. Pemenuhan Hak Atas Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- a. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi untuk menjamin keterjangkauan masyarakat miskin atas pangan;
- b. Bantuan pangan kepada keluarga miskin / rawan pangan sesuai dengan bahan pangan;

2. Pemenuhan Hak Atas Layanan Kesehatan

- 2.1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat miskin
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- 2.2. Program Upaya Kesehatan Perorangan penduduk miskin
 - a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah tertinggal secara selektif.
 - c. Pemberian kartu asuransi kesehatan khusus masyarakat miskin dan desa-desa tertinggal
- 2.3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit bagi masyarakat miskin dan desa tertinggal;
 - a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
- 2.4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat miskin dan desa-desa tertinggal;
 - a. Peningkatan pendidikan gizi;
 - b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kekurangan vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya;
 - c. Peningkatan surveilans gizi; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
- 2.5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat miskin;
 - a. Pengembangan upaya kesehatan bersumber dari masyarakat seperti posyandu dan polindes;
 - b. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat miskin

- 2.6. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
 - a. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat terutama bagi penduduk miskin.

3. Pemenuhan Hak Atas Layanan Pendidikan

- 3.1. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun bagi masyarakat miskin
 - a. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah;
 - b. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 3.2. Program Pendidikan Menengah
 - a. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik;
 - b. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupun non formal untuk masyarakat miskin;
- 3.3. Program Pendidikan Non-Formal
 - a. Perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara;
 - b. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung;
 - c. Perluasan jangkauan kursus ketrampilan yang diintegrasikan dengan usaha mikro dan kemitraan dengan pengusaha;

4. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Penanggulangan kemiskinan

- a. Program Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan